

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator) sebagai upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022, dan adanya hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Dengan demikian Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo setelah melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan sebelumnya dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan hasil review dan adanya perubahan Nomenklatur Struktur Organisasi.

B. Maksud dan Tujuan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo dengan maksud agar dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo sebagai penjabaran dari visi dan misi Bupati Tebo yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan. Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam Penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo

Keberadaan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir kali diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015, memberikan kewenangan dan beban yang cukup besar kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab daerah untuk berupaya mengatur, membangun serta mengembangkan kemampuan / potensi daerah dengan berpijak pada rambu-rambu kewenangan yang telah diserahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dnas Perhubungan Kabupaten Tebo bahwa Dinas Perhubungan selaku pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Perhubungan didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Tebo.

B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tebo Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tebo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo.

Secara Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Subbagian perencanaan dan keuangan
 2. Subbagian administrasi umum

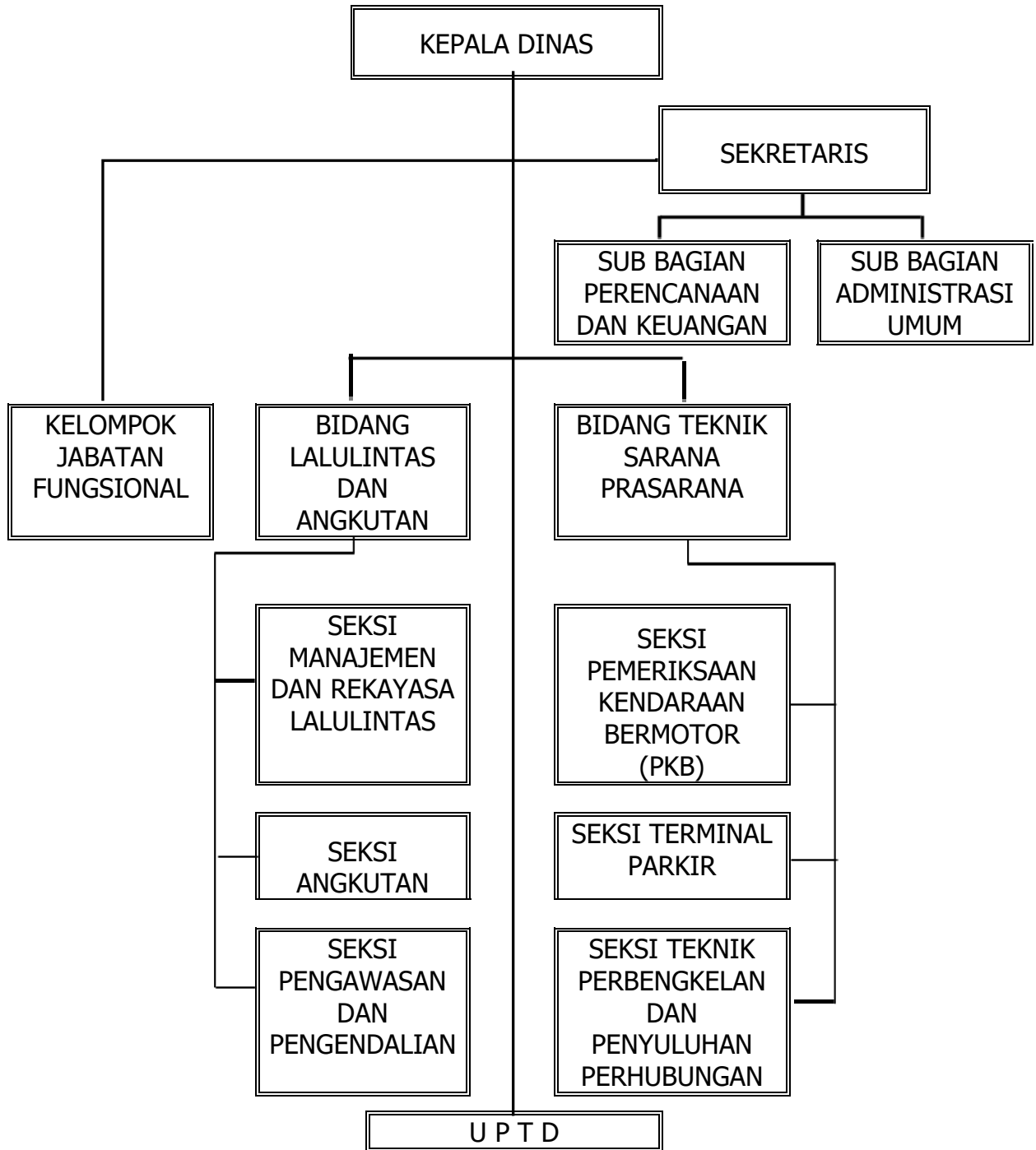
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi :
 - 1. Seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas
 - 2. Seksi Angkutan; dan
 - 3. Seksi pengawasan dan pengendalian
- e. Bidang Teknik Prasarana dan prasarana, membawahi :
 - 1. Seksi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (PKB)
 - 2. Seksi terminal dan parkir
 - 3. Seksi teknik perbengkelan dan penyuluhan perhubungan
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sebagai komponen Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksana tugas bidang Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo menyelenggarakan fungsi:

- 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan.
- 2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Perhubungan.
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan.
- 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo



C. Tujuan dan Sasaran

Sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo menetapkan tujuan yang

hendak dicapai, yaitu : **“Terwujudnya keselamatan berlalulintas, pemenuhan prasarana, Fasilitas Perhubungan dan Fasilitas LLAJ yang memadai serta Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi”**.

Serta menetapkan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana telah dituangkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo.

**Tabel Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja
 Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kondisi Awal	Target Pertahun				
					I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya keselamatan berlalulintas, pemenuhan prasarana, Fasilitas Perhubungan dan Fasilitas LLAJ Yang Memadai serta Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Persentase Penurunan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Kabupaten Tebo	Meningkatkan Ketertiban dan keselamatan pengguna jalan	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Jalan di Kabupaten Tebo	0%	20%	40%	50%	60%	70%
			Persentase Penurunan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Kabupaten Tebo	20%	25%	30%	35%	40%	45%
			Persentase Angkutan Darat yang Memenuhi Standar Keselamatan	50%	60%	70%	80%	95%	95%
	Persentase prasarana, Fasilitas Perhubungan dan Fasilitas LLAJ	Meningkatkan prasarana, Fasilitas Perhubungan dan Fasilitas LLAJ	Persentase peningkatan kendaraan yang masuk terminal	40%	50%	60%	70%	80%	90%
	Indek kepuasan masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan Transportasi	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	C	C	C	B	B	A

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Definisi Indikator Kinerja

Indikator adalah merupakan variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi pada sebuah kejadian atau perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kinerja adalah hasil kerja / perilaku berkarya / hasil karya yang merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi suatu unit organisasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja merupakan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*.

B. Metode penentuan Indikator Kinerja

Banyak pendapat mengenai cara dan metode pengukuran kinerja suatu instansi/ lembaga/ Dinas/ Badan/ Kantor. Salah satunya menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, maka tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut.

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang

akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dilaksanakan suatu unit kerja.

Dengan demikian tanpa indikator kinerja sulit untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) dari suatu kebijakan / program / kegiatan.

C. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan. Indikator Kinerja dapat dikatakan baik apabila memenuhi kriteria "**SMART**" yaitu:

1. **Specific**, yaitu jelas dan terfokus (spesifik) sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.
2. **Measurable**, yaitu dapat diukur / dikuantifikasi secara obyektif.
3. **Achievable**, yaitu dapat diraih atau dapat direalisasikan.
4. **Relevant**, yaitu selaras (relevan) dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur
5. **Time-Bound**, yaitu dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan (berjangka waktu).

D. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) dari suatu kebijakan / program / kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo, maka perlu ditetapkan suatu Indikator Kinerja

yang mencerminkan tujuan / sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan sebagai komponen pemerintah kabupaten yang mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksana tugas bidang Perhubungan.

Dari beberapa indikator kinerja yang ada, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditunjukkan pada Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut :

E. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) dari suatu kebijakan / program / kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo, maka perlu ditetapkan suatu Indikator Kinerja yang mencerminkan tujuan / sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan sebagai komponen pemerintah kabupaten yang mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksana tugas bidang Perhubungan.

Dari beberapa indikator kinerja yang ada, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditunjukkan pada Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- INSTANSI** : **DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO**
- TUJUAN** : Terwujudnya keselamatan berlalulintas, pemenuhan prasarana, Fasilitas Perhubungan dan Fasilitas LLAJ yang memadai serta Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi.
- TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan
- FUNGSI** : 1. Perumusan kebijakan daerah dibidang perhubungan.
 2. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perhubungan;
 3. Pelaksanaan administrasi dinas daerah dibidang perhubungan;
 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang perhubungan; dan
 5. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULA ENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Ketertiban dan keselamatan pengguna jalan	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Jalan di Kabupaten Tebo	$f(x) = \frac{\Sigma \text{pelanggaran Th.n} - \Sigma \text{pelanggaran Th.(n-1)}}{\Sigma \text{pelanggaran Th. (n-1)}} \times 100\%$ <p>Dengan : $f(x)$: Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggaran di Kabupaten Tebo</p>	Data Pelanggaran Lalu Lintas	Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULA ENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		Persentase Penurunan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Kabupaten Tebo	$f(x) = \frac{\Sigma \text{kecelakaan Th.n} - \Sigma \text{kecelakaanTh(n-1)}}{\Sigma \text{kecelakaan Th. (n-1)}} \times 100\%$ <p>Dengan : $f(x)$: Prosentase Penurunan Jumlah Kecelakaan di Kabupaten Tebo</p>	Data Kecelakaan Lalu Lintas	Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan
		Persentase Angkutan Darat yang Memenuhi Standar Keselamatan	$f(x) = \frac{\Sigma \text{Angk. Jalan Yang Lulus Uji KIR Th. n}}{\Sigma \text{Angk. Jalan yang Tersedia Th. n}} \times 100\%$ <p>Dengan : $f(x)$: Prosentase Angkutan Jalan yang Memenuhi Standar Keselamatan</p>	Data Kendaraan di Kabupaten Tebo	Bidang Teknik Sarana Prasarana
2	Meningkatkan prasarana, Fasilitas Perhubungan dan Fasilitas LLAJ	Persentase kendaraan yang masuk terminal	$f(x) = \frac{\Sigma \text{Kendaraan barang yang masuk terminal}}{\Sigma \text{Kendaraan barang yang lewat terminal}} \times 100\%$	Kendaraan	Bidang Teknik Sarana Prasarana
3	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

BAB IV

PENUTUP

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Instansi Pemerintah khususnya dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo sebagai dasar untuk melihat, mengukur, dan menilai tingkat kinerja suatu program yang dijalankan/ dilaksanakan yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai dasar pengukuran (keberhasilan/ kegagalan) kinerja serta tingkat akuntabilitas masing-masing Instansi Pemerintah.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal, maka diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang lebih baik, lebih terukur dan lebih spesifik. Informasi yang diperoleh akan digunakan sebagai acuan dalam membuat keputusan- keputusan / kebijakan sehingga dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan atau bahkan bisa meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.